

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran.¹

Kota Semarang memiliki banyak pasar tradisional yang dapat dikatakan sudah dikelola dengan baik dan memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di berbagai wilayah di Kota Semarang untuk mengatur pasar-pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Semarang. UPTD-UPTD tersebut dibentuk untuk menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu untuk mengatur dan mengontrol pasar-pasar tradisional di Kota Semarang.²

Saat ini, pasar ikan Rejomulyo Semarang telah direvitalisasi dan pasar Rejomulyo Baru selesai dibangun sejak tahun 2016, dimana revitalisasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi pasar Rejomulyo yang dibuat tahun 2013. Namun, sampai saat ini masih ada permasalahan dalam pelaksanaan

¹ Armstrong dan Kotler. *Prinsip- Prinsip Pemasaran*. (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 51

² <http://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/pasar-dan-uptd-metrologi-legal/>

kebijakan tersebut. Mulai dari kurangnya perencanaan dalam membuat kebijakan ataupun pedagang pasar Rejomulyo yang mengeluh dengan keadaan dan kondisi pasar Rejomulyo baru, sehingga beberapa pedagang menolak untuk direlokasi ke pasar baru dan masih menetap di pasar Rejomulyo Lama sampai saat ini.

Dalam teori kebijakan publik menurut William Dunn, suatu kebijakan yang dikeluarkan harus sudah melalui tahap-tahap tertentu sehingga kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan tujuan dan target. Namun, dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pedagang pasar Rejomulyo, khususnya pedagang ikan basah.

Pembangunan pasar Rejomulyo Baru sudah dilakukan dan dibangun di tempat strategis yang berada sekitar 100 meter dari pasar Rejomulyo Lama. Tetapi, bangunan maupun kondisi pasar Rejomulyo Baru masih bermasalah, dimana pasar Rejomulyo Baru tidak sesuai dengan keinginan pedagang pasar Rejomulyo. Selain itu, relokasi pedagang dari pasar Rejomulyo Lama ke pasar Rejomulyo Baru tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena sampai saat ini masih ada pedagang yang belum pindah ke pasar Rejomulyo Baru dan masih menempati Pasar Rejomulyo Lama.

Pasar Rejomulyo sudah direvitalisasi dan sudah dibangun pasar Rejomulyo Baru. Namun, proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo tidak berjalan dengan baik. Pedagang jenis ikan basah tidak ada yang mau pindah dan menempati kios di pasar Rejomulyo Baru sehingga pasar Rejomulyo Baru menjadi sepi. Pedagang

tidak mau pindah karena menganggap kondisi pasar Rejomulyo tidak sesuai dengan keinginan mereka dan kurangnya fasilitas yang memadai sehingga pasar Rejomulyo Baru tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal itu menyebabkan pedagang tidak mau pindah ke pasar Rejomulyo Baru, khususnya pedagang ikan basah.

Disini penulis akan menganalisis berbagai permasalahan dan penyebab dari implementasi kebijakan relokasi pasar yang tidak berjalan dengan baik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu:

1. Mengapa proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo gagal, sementara proses revitalisasi sudah selesai dilaksanakan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah kota semarang untuk mengatasi masalah gagalnya proses relokasi pedagang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang penyebab gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo, padahal proses revitalisasi sudah selesai dilaksanakan dan pasar Rejomulyo Baru sudah selesai dibangun.
2. Untuk menjelaskan upaya yang sudah dan yang akan dilakukan pemerintah kota semarang untuk mengatasi masalah gagalnya proses relokasi pedagang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya wacana tentang analisis evaluasi kebijakan khususnya tentang analisis evaluasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional dan permasalahannya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau literatur untuk setiap orang yang ingin mengkaji tentang analisis evaluasi kebijakan khususnya evaluasi kebijakan tentang relokasi pedagang pasar tradisional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan memberikan sumbangan berupa tambahan pemahaman kepada pemerintah daerah untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan khususnya implementasi dan evaluasi kebijakan dalam relokasi pedagang pasar tradisional dan hambatan/permasalahan yang terjadi agar nanti

implementasi kebijakan kedepannya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meminimalisir permasalahan yang akan terjadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pemahaman kepada masyarakat khususnya pedagang untuk mengetahui permasalahan yang dapat terjadi dalam implementasi dan evaluasi kebijakan khususnya implementasi dan evaluasi kebijakan relokasi pedagang pasar tradisional sehingga nantinya masyarakat dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan/merencanakan dalam pembuatan kebijakan agar nantinya kebijakan yang akan dibuat dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk dilakukan rencana kaji ulang dari kebijakan yang sudah ada.

1.5 Tinjauan Literatur

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan, kajian Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang belum ada yang mengkaji. Akan tetapi sudah ada hasil karya yang relevan yang penulis teliti, hanya saja objek yang dikaji berbeda. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

1. Analisis Relokasi Pedagang Pasar Ngarsopuro di Kota Surakarta oleh Rudi Laksono (2013). Penelitian ini membahas tentang bagaimana kondisi

pedagang sebelum dan sesudah program relokasi pedagang di pasar Ngarsopuro berjalan, baik dari segi pendapatan dan keuntungan pedagang, maupun tenaga kerja pedagang di pasar Ngarsopuro. Sehingga dalam penelitian tersebut membahas tentang kesejahteraan pedagang sebelum dan sesudah berjalannya program relokasi pedagang di pasar Ngarsopuro. Literatur ini juga menjelaskan permasalahan dan kendala dalam berjalannya kebijakan relokasi pedagang dan dampak yang dialami pedagang dari segi pendapatan, keuntungan, dan tenaga kerja akibat dari kebijakan relokasi pedagang tersebut.

2. Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta oleh Agata Ika Febrilianawati (2010). Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun terdapat beberapa masalah dalam merelokasi PKL, namun akhirnya PKL rela dan mau direlokasi. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara oleh Pemerintah Kota Surakarta ke Pasar Panggungrejo di belakang Kantor Kecamatan Jebres dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL. Dimana tujuan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara serta menciptakan kawasan asri sehubungan dibangunnya *Solo Techno Park*. Hal itu nampak pada terlaksananya dengan cukup baik program Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL dimana berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1995 tentang penataan Pedagang Kaki Lima. Program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau tahapan yaitu tahap Sosialisasi Kebijakan, Penertiban,

Penataan dan Pembinaan. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL tersebut karena tempat yang disediakan untuk berjualan masih sepi dan belum ramai, masalah dalam pembangunan dan pembagian kios, dan kurangnya pembinaan pedagang saat dipindah ke lokasi baru.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Carl Friedrich, melihat kebijakan yaitu sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.³

Charles Lindblom mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan.⁴ Oleh karena itu, banyak ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini yaitu untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan

³ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm 36

⁴ Ibid,

publik. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn adalah sebagai berikut:⁵

1. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah aktor pembuat kebijakan dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini bersaing dan berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan dan kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, pada tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk

⁵ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 22

memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan saja, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada

dasarnya dibuat untuk mencapai dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat diketahui bahwa evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam tahapan kebijakan publik. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan tanggapan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai tersebut diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai tersebut juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi

dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi seangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Briant & White evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant & White di atas, mengarahkan bahwa penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan.⁶

Menurut Samodra Wibawa, evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada aktor pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar mencari cara implementasi lain.⁷

⁶ Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 63

⁷ Ibid,

Menurut William Dunn, evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut⁸:

1. Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi fakta nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 608-609

3. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

4. Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.⁹

1. Evaluasi Semu

Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap

⁹ Ibid,

individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teori keputusan di satu sisi, evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan.

1.6.2 Pengertian Relokasi

Pengertian Relokasi adalah pemindahan lokasi, baik bangunan, industri, tempat, atau orang dari suatu negara maju ke negara berkembang atau dari negara atau negara lain untuk mendekati bahan baku dan menghasilkan jenis barang yang mampu bersaing di pasar internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah segera diwujudkan.¹⁰

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Salah satu cara merevitalisasi atau membangun pasar tradisional yang baru adalah menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi, seperti tempat bersantai dan rekreasi bersama dengan keluarga.

Menurut Musthofa, Lokasi dan tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar.¹¹ Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu (tempatnyanya yang lama) dari segi

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus besar bahasa indonesia 1982:739

¹¹ Musthofa, Z. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Diakses melalui <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/18746/NDUyMzQ=/Evaluasi-Pelaksanaan-Program-Relokasi-Permukiman-Kumuh-Studi-Kasus-Program-Relokasi-Permukiman-di-Kelurahan-Pucangsawit-Kecamatan-Jebres-Kota-Surakarta-Binder1.pdf>, pada tanggal 5 Juni 2018, pukul 16.35

karakteristik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan relokasi dan pemilhan pendapatan berhasil. Idealnya tempat relokasi baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama asli untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik.

Menurut August Losch, untuk mencapai keseimbangan ekonomi ruang harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Setiap lokasi usaha menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli
2. Terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran cukup merata, sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani
3. Konsumen bersikap *indifferent* terhadap penjual manapun dan satusatunya pertimbangan untuk membeli adalah harga yang rendah.

Berdasarkan uraian di atas, maka relokasi dapat dikatakan yaitu merupakan pemindahan lokasi dari satu tempat ke tempat lain, dimana relokasi tersebut berhasil jika pemindahan lokasi yang baru, tidak jauh dari lokasi yang lama, sehingga komunikasi masyarakat dan jaringan sosial yang sudah baik masih bisa dipertahankan.

Relokasi Pasar adalah pemindahan pasar lama ke pasar baru yang lebih strategis dengan bangunan permanen lebih baik, didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang nyaman.

Kehadiran PKL di suatu kota pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi.

Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul gagasan relokasi. Evers dan Korff menyatakan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar.¹² Isna berpendapat bahwa PKL merupakan pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan, dan seringkali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.¹³

PKL merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi sektor informal di bidang perdagangan dan atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok di ruang terbuka strategis atau menetap yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan fasilitas yang mudah dibongkar pasang maupun bangunan semi permanen.

Relokasi oleh Harianto didefinisikan sebagai suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya.¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa relokasi adalah suatu upaya penempatan kembali sebuah aktivitas/kegiatan dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan alasan-alasan dan tujuan tertentu. Kaitannya dengan relokasi PKL berarti aktivitas/kegiatan yang dipindahkan tentu saja PKL itu sendiri.

¹² Dalam Isna, Alizar., *Rekam Jejak dan Peta Pustaka Pedagang Kaki Lima: Sebuah Pengantar Diskusi*, diakses <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/download/245/307>, pada tanggal 04 Mei 2019, pukul 14.00

¹³ Ibid,

¹⁴ Harianto, *Merger dan Akuisisi*. (Jurnal Manajemen, 2001), diakses pada tanggal 04 Mei 2019, pukul 14.10

Relokasi PKL harus mempertimbangkan faktor lokasi. Apakah lokasi tersebut cukup strategis, mudah dijangkau (aksesibilitas), tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai, cukup menarik secara visual, terjangkau secara ekonomi oleh pedagang, adalah rentetan pertanyaan terkait dengan kualifikasi lokasi yang disyaratkan. Tujuan relokasi PKL tidak hanya memindahkan lokasi berjualan tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Ramdhani dan Harianto menerangkan hal – hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi PKL¹⁵, yaitu :

- a. Kestrategisan lokasi, yaitu konsumen mudah menjangkau lokasi usaha PKL karena adanya aksesibilitas yang mendukung.
- b. Faktor visual, memberikan kesan harmonis dan asri sehingga mudah menarik minat konsumen,
- c. Hirarki pembangunan, jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien,
- d. Sewa atau penjualan tanah/kios yang murah sehingga tidak memberatkan pedagang.

Lokasi untuk relokasi PKL harus memperhatikan beberapa poin berikut, yaitu :

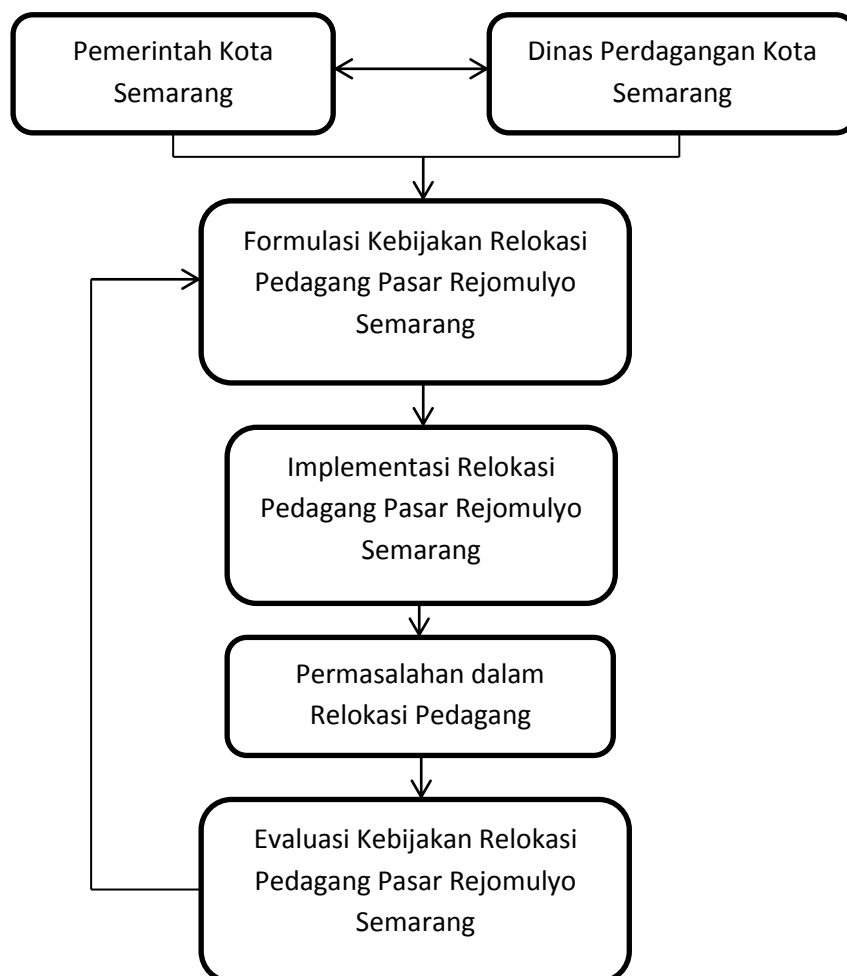
1. Memperhatikan faktor lokasi dan permintaan barang.
2. Mempunyai akses masuk kedalam pasar yang memadai, minimal 2 jalan untuk akses masuk dan akses keluar.

¹⁵ Ibid,

3. Dekat dengan terminal atau stasiun kereta sehingga memudahkan pergerakan konsumen dan pedagang.
4. Prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Seperti drainase, listrik, gas, air bersih dan tempat pembuangan sampah (TPS).

Jadi, relokasi adalah usaha memindahkan PKL dari lokasi yang tidak sesuai ke sebuah lokasi yang dinilai layak menampung pedagang dengan memperhatikan semua aspek. Khususnya aspek ketertiban, keindahan dan kebersihan.

1.7 Kerangka Berfikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Evaluasi Kebijakan

Pengertian evaluasi kebijakan publik adalah sebuah penilaian terhadap kebijakan-kebijakan politik dalam bidang sosial yang menyangkut kehidupan publik. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep evaluasi kebijakan untuk meneliti dalam evaluasi implementasi kebijakan relokasi pedagang di pasar Rejomulyo Kota Semarang. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn menggunakan empat karakteristik yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dan dualitas nilai.

Peneliti dalam melakukan penelitian juga melakukan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan yang dikemukakan oleh William Dunn, yaitu pendekatan evaluasi formal. Peneliti menggunakan pendekatan evaluasi formal karena pendekatan tersebut dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan, karena evaluasi formal dapat mengevaluasi proses implementasi kebijakan dan dapat diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya, baik dari sumber langsung dan tidak langsung.

Selain itu, dalam melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Rejomulyo Semarang, peneliti juga ingin melihat dan

membuktikan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan karakteristik dari konsep evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn. Peneliti ingin membuktikan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan lampau, dan dualitas nilai.

Agar dapat mengevaluasi kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang harus dapat dievaluasi dari peraturan atau dasar hukum dari kebijakan relokasi pedagang tersebut. Dasar hukum dari kebijakan tersebut berasal dari Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar. Dari perda tersebut, diambil pasal-pasal yang dapat digunakan untuk dijadikan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo, seperti pasal 9 tentang pembangunan fisik gedung pasar, pasal 13 tentang renovasi pasar, pasal 15 tentang pemanfaatan pasar yang berupa pengaturan kawasan dan zonasi pasar, atau pasal 34 tentang evaluasi pasar yang berupa revitalisasi pasar, dsb.

Jadi, isi dari kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang yaitu berupa pemindahan pedagang dari bangunan pasar lama ke bangunan pasar yang baru, pemindahan bangunan fisik pasar Rejomulyo, renovasi dan revitalisasi pasar Rejomulyo, dan relokasi pedagang pasar Rejomulyo dari pasar Rejomulyo Lama ke pasar Rejomulyo Baru.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara sistematis yang berguna untuk mendapatkan pemecahan masalah dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang

digunakan harus sesuai dan saling mendukung satu sama lain agar tidak menghasilkan kesimpulan yang merugikan. Peneliti menggunakan langkah-langkah dalam proses penelitian yang merupakan rangkaian kegiatan, sebagai berikut:

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau kalimat, data berdasarkan teori dari pendapat orang-orang tertentu baik tertulis maupun lisan, dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Rejomulyo Kota Semarang yang berada di Jl. Pengapon No.31 B. Peneliti juga mengambil lokasi di Dinas Perdagangan Kota Semarang yang berada di Jl. Dokter Cipto No.115, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang.

¹⁶ Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.¹⁷ Teknik yang digunakan dalam subjek penelitian adalah wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang-orang tertentu di tempat yang terkait.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk merinci kekhususan ke dalam temuan konteks yang unik, dan menggali informasi yang menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian dan bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah, tapi didasarkan atas tujuan tertentu.¹⁸

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala atau staff Dinas Perdagangan Kota Semarang, beberapa pedagang di Pasar Rejomulyo Kota Semarang, kepala kantor pengelola di Pasar Rejomulyo Kota Semarang, kepala kantor UPTD Pasar Wilayah Karimata.

1.9.4 Jenis Data

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah kualitatif. Maka data yang dikumpulkan dan digunakan berupa kata-kata

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hlm. 145

¹⁸ Ibid,

(ucapan, pendapat dan gagasan) maupun tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Data yang diperoleh berupa kata, kalimat, lisan, maupun tertulis. Sekaligus sumber data tertulis yang diperoleh berupa dokumen dan arsip resmi yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Peneliti dapat memperoleh data kualitatif melalui teknik-teknik pengambilan data secara kualitatif melalui orang-orang tertentu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1.9.5 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Dr. Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data ini berguna untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang evaluasi kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Kota Semarang sehingga bisa dibandingkan antara hasil data dari subjek penelitian dengan kondisi di lapangan.

¹⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm, 112.

- b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, Data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi terkait maupun masyarakat yang ikut dalam proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang, misalnya Dinas Perdagangan Kota Semarang, kantor pengelola pasar Rejomulyo Kota Semarang, dan kantor UPTD Pasar Wilayah Karimata.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam tiga langkah²⁰:

1. *Geeting in*

Merupakan proses memasuki lokasi penelitian.

2. *Getting along*

Merupakan proses berada di lokasi penelitian, dimana dalam lokasi penelitian tersebut peneliti berusaha menjalin kepercayaan dengan informan pada saat berada di lokasi penelitian, agar informan dapat memberikan informasi yang di butuhkan peneliti.

3. *Logging the data*

Proses mengumpulkan data dari informan :

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV., 2013), hlm, 224.

a. Wawancara mendalam (*Depth Interview*)

Peneliti melakukan wawancara terhadap kepala atau staff Dinas Perdagangan Kota Semarang, kepala atau staff UPTD Karimata Kota Semarang, beberapa pedagang di Pasar Rejomulyo lama dan pasar Rejomulyo baru Kota Semarang, kantor pengelola di Pasar Rejomulyo Kota Semarang.

b. Observasi

Merupakan upaya pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperkuat dan meyakinkan hasil wawancara dan fenomena selama proses *getting along*. Peneliti melakukan observasi atau mengamati objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini, objek penelitian berada di Pasar Rejomulyo Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Mencari dan memperoleh dokumen berupa arsip-arsip yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang, kantor UPTD Karimata, kantor pengelola di Pasar Rejomulyo Kota Semarang.

d. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari literatur dan buku yang relevan dari penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memakai sebagian besar wawancara mendalam dan observasi serta akan sedikit menggabungkan dokumentasi dan studi pustaka. Tetapi porsi lebih besar akan terdapat di wawancara mendalam.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Creswell analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian dan melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari pada partisipan dan memerlukan pemahaman bagaimana untuk mempertimbangkan dan menggambarkan teks, sehingga peneliti dapat menjawab bentuk pertanyaan penelitian peneliti.

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat

mereduksi data-data yang dimiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan *“the most frequent form of display data for qualitative reserch data in the past has been narrative tex”*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Conclusion Drawing (Kesimpulan Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dilakukan oleh memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Data diperoleh dari wawancara terhadap subjek tertentu dan dari dokumen atau arsip penting yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak.

1.9.8 Kualitas Data

Untuk membuktikan keabsahan data kualitatif maka diperlukan validitas dan reliabilitas dalam membuktikan keabsahan data yang digunakan. Validitas dan reliabilitas merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian. Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi aktivitas manusia.

Kredibilitas (*credibility*). Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisa kasus negatif, dan memberchecking (proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data).

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Karena dari itu ada yang disebut dengan, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu:

- a. Triangulasi Sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari berbagai sumber tersebut, nantinya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber-sumber itu, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif. Setelah menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersbut.
- b. Triangulasi Teknik. Mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, dan kuisisioner. Jika menghasilkan data yang berbeda-beda, bisa jadi semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain, ununtuk memastikan data mana yang dianggap benar.
- c. Triangulasi Waktu. Misalnya ketika data dilakukan dengan teknik wawancara di pagi hari, disaat narasumber masih segar, dan belum banyak

masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Karena itu waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

Transferabilitas (*transferability*). Criteria transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas ini merupakan validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

Dependabilitas (*dependability*). Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut juga dengan reliabilitas. Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing.

Konfirmabilitas (*confirmability*). Dalam penelitian kuantitatif pengujian ini disebut sebagai uji obyektivitas penelitian yaitu, jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang maka penelitian dikatakan obyektif. Namun dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas ini dapat dilakukan bersamaan dengan uji dependabilitas karena mirip. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan.